

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan energi di dunia saat ini menjadi titik sentral perhatian dari banyak negara industri yang maju, berkembang, hingga negara yang disebut miskin sekalipun, sehingga memiliki pengaruh terhadap kepentingan banyak negara. Hal ini dapat memicu konflik antar negara karena menyangkut hidup yang berkelanjutan dan kapasitas suatu negara dalam melanjutkan pembangunan. Kepemilikan energi dapat menjadi kekuatan politik pada suatu negara saat ini untuk mengejar tujuan nasional masing-masing dan negara yang bergantung pada energi negara lain hanya akan tercatat sebagai bukti kelemahan (Iskandar, 2022).

Permasalahan energi menjadi salah satu perhatian utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh krisis energi dan peningkatan kebutuhan masing-masing negara akibat pertumbuhan industrialisasi yang pesat serta kepentingan militer masing-masing negara (Nur, 2021). Keberlanjutan energi nasional dan adopsi energi terbarukan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keamanan energi suatu negara. Kini, energi terbarukan telah menjadi fokus utama dalam agenda global sebagai respon terhadap tantangan energi, perubahan iklim yang kian memburuk dan ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Ketersediaan energi yang sumbernya dari bahan bakar fosil (minyak dan gas) kini menjadi suatu permasalahan strategis bagi banyak negara maju dan berkembang.

Tabel 1. 1Cheapest Levelized Cost of Energy

	UK	US	Australia	Mexico	India	Thailand	China	Vietnam	Japan	Philipines	Malaysia	South Korea	Indonesia
2018	2	2	2	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4
2019	2	2	1	2	1	1	2	4	4	4	4	4	4
2020	2	2	1	2	1	1	1	4	4	4	4	4	4
2021	2	2	1	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4
2022	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4

Sumber: Institute for Energy Economics and Financial Analysis (2023).

Keterangan:

1 Solar 2 Wind 3 Gas 4 Coal

Berdasarkan tabel tersebut telah menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara yang sudah terlebih dahulu beralih dari penggunaan energi fosil batu bara yang relatif lebih murah, tetapi mengeruk biaya lebih besar untuk dampak lingkungan yang dihasilkan. Selanjutnya, melansir dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi batu bara Indonesia mencapai jumlah 745.72 juta barel minyak setara pada tahun 2022 yang meningkat dari tahun ke tahunnya yaitu 558.78 juta barel minyak setara (Jong, 2023).

Menyikapi permasalahan tersebut, Indonesia memiliki urgensi untuk menggunakan energi terbarukan guna meminimalisir bencana baik pada lingkungan maupun sosial. Tepatnya pada kepemimpinan Joko Widodo ditemukan perubahan arah kecenderungan kebijakan sektor energi kepada pengembangan fisik dan

investasi energi terbarukan seperti yang sudah dihasilkan dalam komitmen *Paris Agreement* dan prinsip United Nation Energy pada SDGs nomor 7 yaitu energi yang berkelanjutan dan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengamanatkan penyediaan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hal tersebut mengantarkan Indonesia pada urgensi untuk dapat melakukan percepatan transisi energi sebagai respon atas menurunnya produksi energi fosil yang digunakan secara terus menerus, mengingat jumlah cadangan minyak yang dimiliki oleh Indonesia hanya sebesar 0,1% dari cadangan seluruh dunia. Hal ini didukung lagi dengan kepentingan lain, yaitu menunjukkan posisinya kepada dunia bahwa Indonesia memiliki konsistensi dan komitmen dalam menjaga suhu bumi agar tidak terus menerus mengalami kenaikan. Kepentingan Indonesia selanjutnya adalah menerima bantuan dari negara asing yang dapat berubah hibah atau investasi energi terbarukan hingga transfer teknologi. Dengan usaha tersebut Indonesia berusaha mempercepat transisi energi terbarukan (Rizki et al., 2023).

Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut ada beberapa tantangan yaitu biaya produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan yang masih relatif lebih tinggi dari pembangkit listrik konvensional mulai dari proses produksi hingga pemeliharaan yang turut menjadi tantangan. Dibutuhkan sekitar 97,3 miliar dollar hanya untuk transisi dari ketergantungan pemakaian batubara ke energi terbarukan (JETP, 2023). Negara berkembang seperti Indonesia sebenarnya memiliki impian seperti negara maju yang melakukan transisi dengan mengadopsi rencana

internasional ke dalam rencana domestik tetapi, kendala pembiayaan bukanlah hal yang mudah (Yoesgiantoro, 2017). Oleh karena itu, Indonesia melakukan kerjasama dengan Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* untuk mencapai tujuan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan.

China bersama dengan mitra internasional secara resmi meluncurkan *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (BRIGC) pada forum kedua *Belt and Road Initiative* untuk kerjasama internasional. BRIGC bertujuan untuk mempromosikan pembangunan hijau berkelanjutan di negara-negara yang terlibat dalam *Belt and Road Initiative*, mendirikan sarana dialog dan komunikasi kebijakan, sarana pengetahuan dan informasi lingkungan, sarana pertukaran dan transfer teknologi hijau sehingga mendapatkan kesepakatan global dalam proses kerjasama dan dapat diimplementasikan dalam *Green Belt and Road Initiative*.

Dalam pelaksanaan *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (BRIGC), meskipun terdapat capaian yang signifikan, tetapi juga diikuti oleh sejumlah masalah yang cukup merisaukan. Contohnya, terdapat kontroversi dan kerentanan ekonomi di negara-negara yang menjadi partisipan BRIGC. Hal ini tercermin dalam hilangnya mata pencaharian penduduk lokal, perampasan tanah, dan penggundulan hutan, yang merupakan dampak negatif yang cukup mencolok. Selain itu, terjadi ketidakstabilan ekonomi di beberapa negara, dengan utang terhadap Tiongkok yang semakin meningkat, meningkatkan risiko jatuh ke dalam jebakan utang (Ngin, 2022). Selama tahun 2013-2020, terdapat 700 insiden pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan melibatkan lebih dari 10.000 perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam proyek-proyek BRI. Sekitar sepertiga dari

pelanggaran ini terjadi di kawasan Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Indonesia (Mutia, 2023).

Keberhasilan dari mega proyek *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* dapat dilihat dari negara tetangga yaitu Singapura dengan *Closing the Waste Loop* yang berhasil dibiayai oleh Tiongkok sebesar USD 45 juta. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi limbah dengan memanfaatkan dan mendaur ulang limbah agar bisa digunakan secara berkelanjutan. Proyek ini memerlukan strategi menggunakan limbah untuk dimanfaatkan sebagai energi. Keberhasilan proyek ini juga dilanjutkan di negara pencetusnya yaitu Tiongkok yang bekerjasama dengan Singapura membangun The Sino-Singapore Tianjin Eco City. Setelah berhasil dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan *low-carbon* dan membangun *smart city* dengan tujuh ribu perusahaan keduanya bersepakat menjalin kerjasama pada proyek tersebut. The Sino-Singapore Tianjin Eco City adalah proyek kolaborasi antara Singapura dan Tiongkok dalam membangun kota yang ramah lingkungan di Tianjin, Tiongkok. Proyek ini mencakup beberapa inisiatif termasuk juga penggunaan teknologi hijau, pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan air yang efisien.

Terdapat juga beberapa ancaman yang berpotensi dihadapi terkait kerjasama *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* yaitu *debt trap* yang dilayangkan oleh Tiongkok melalui pemberian bantuan dan penanaman modal besar-besaran yang membuat negara penerima mengalami kesulitan untuk membayar dan berakhir harus merelakan kedaulatan diintervensi oleh negara yang memberikan pinjaman (Yudilla, 2019). Kejadian ini pun menimpa Sri Lanka yang

berambisi melakukan pembangunan Pelabuhan yang sangat besar yaitu Pelabuhan Hambantota, tetapi justru berimbas terkena *debt trap*. Sri Lanka berada pada ketidakmampuan dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok, hingga akhirnya Pelabuhan tersebut diambil alih oleh Tiongkok pada bulan Desember 2017. Hal ini menunjukkan kompleksitas interdependensi dan juga memicu kewaspadaan kepada negara-negara yang terlibat kerjasama dengan Tiongkok.

Hal serupa juga terjadi pada negara lain dalam melakukan kerjasama luar negeri yaitu Georgia dan Rusia terhadap perdagangan energi listrik pada tahun 2015. Disebutkan dalam tulisan Amistia (2017) dengan hasil bahwa distribusi *power* antara Georgia dan Rusia tidak seimbang, sehingga keuntungan hanya diperoleh oleh satu negara saja.

Dengan demikian, kerjasama pada *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* menghadapi interdependensi kompleks yang melibatkan manfaat bersama dan juga tantangan seperti resiko “*debt trap*” dan “*power asymmetry*” yang perlu untuk dipertimbangkan dengan cermat oleh masing-masing negara. Selain itu, penting untuk negara-negara yang terlibat tidak hanya memperhitungkan faktor keuntungan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan. Dengan memperhitungkan faktor secara holistik kerjasama ini dapat dimanfaatkan dengan baik terutama oleh Indonesia dan Tiongkok.

Pada penelitian ini, penulis memiliki rujukan pada beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung argumen yang disajikan. Referensi-referensi tersebut

memainkan peran penting dalam landasan teoritis serta memperjelas konteks penelitian yang dilakukan. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, penulis dapat mengembangkan argumen yang lebih kuat dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, alasan penulis memilih topik energi terbarukan dalam kerjasama *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* berkaitan erat dengan kepentingan nasional Indonesia dan teori interdependensi kompleks. Rumusan masalah ini tidak hanya relevan dengan kepentingan nasional Indonesia dalam mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan teori interdependensi kompleks dalam kerjasama tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat Indonesia sebagai salah satu anggota *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* yang memiliki wilayah dan potensi sumber daya alam yang strategis terutama dalam sektor energi terbarukan maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kepentingan nasional Indonesia yang mendasari partisipasinya dalam kerjasama energi terbarukan dengan *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (BRIGC)?
2. Bagaimana bentuk interdependensi antara Indonesia dan mitra *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (Tiongkok) mempengaruhi pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama energi terbarukan?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah agar terdapat relevansi yang cukup jelas mengenai sumber dan referensi yang akan diteliti dalam penelitian ini dan mempermudah peneliti dalam melakukan fokus penelitian. Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada kepentingan nasional dan interdependensi kompleks Indonesia dalam kerjasama energi terbarukan pada *Belt and Road Initiative Green Development Coalition*.

1.4. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan peneliti yaitu

1. Untuk mengetahui apa saja kepentingan nasional Indonesia yang mendasari partisipasinya dalam kerjasama energi terbarukan dengan *Belt and Road Initiative Green Development Coalition* (BRIGC).
2. Untuk mengetahui bentuk interdependensi antara Indonesia dan mitra BRIGC (Tiongkok) mempengaruhi pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama energi terbarukan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berguna baik secara teoritis, maupun secara praktis diantaranya:

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini:

1. Menjadi pembanding antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang tersedia.

2. Memberikan penjabaran seputar kepentingan nasional dan interdependensi Indonesia dengan Tiongkok dalam kerjasama energi terbarukan pada BRIGC.
3. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya pengetahuan ilmu dalam ruang lingkup politik luar negeri.
4. Manfaat secara praktis dari penelitian ini:
5. Dapat digunakan untuk memberikan pedoman penelitian sejenis secara mendalam.
6. Mengembangkan pola pikir mahasiswa dalam menerapkan keilmuan yang diperoleh bagi masyarakat.
7. Dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis suatu kebijakan Indonesia dalam mega proyek ini.